

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin dalam suatu organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas sehingga organisasi itu akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan (Drs. Hasan Basri, 2014). Visi dan misi akan menjadi pegangan dan pedoman bagi pemimpin dalam menjalankan program kerjanya bersama dengan bawahannya. Pemimpin harus memiliki keberanian dan tekad serta yakin bahwa apa yang mereka lakukan dapat merubah keadaan. Keberanian dan nekat adalah modal utama dan yang paling penting, tekad yang dimaksud adalah tekad dalam mencari trobosan-trobosan baru. Seorang pemimpin harus bisa menjadi komunikator yang baik dengan bawahan, atasan, rekan kerja dan sebagainya sehingga dengan komunikasi yang terjalin dengan baik akan melahirkan suasana kerja yang kondusif.

Keberadaan pemimpin dalam perspektif organisasi terutama organisasi sector publik atau organisasi pemerintahan tidak hanya ditujukan untuk efektifitas dan efisiensi, namun juga bergerak pada konsep akuntabilitas, demokras, partisipasi dan transparansi. Hal ini dilakukan untuk memacu setiap negara dalam konteks organisasi agar mengimplementasikan kriteria tersebut untuk mencapai Good Governance. Dalam konteks itulah maka organisasi sektor publik harus memiliki pemimpin yang baik.

Kartini kartono dalam bukunya mengatakan bahwa “didalam kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kiwibawaan pemimpin. Para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya, dan bangkitlah secara spontan rasa ketaan pada pemimpin”. (Kartono, 2016)

Kepala desa mempunyai tugas dan wewenang untuk mempengaruhi, mengajak mengarahkan dan menggerakkan semua

masyarakatnya agar mau untuk diajak bekerjasama melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kepala desa dalam mempengaruhi dan mengajak masyarakat agar mengikuti kehendaknya dan melaksanakan secara sadar agar rela berkorban demi kemajuan desanya memerlukan kesabaran dan keuletan karena harus banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengertian dan motivasi secara terus menerus agar terwujud tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Di desa Glinggang terdapat potensi-potensi yang cukup besar. Potensi-potensi itu antara lain hadirnya beberapa home industri kripik jamur, kripik tempe dan mering jagung yang masih bisa untuk dikembangkan lagi. Selain itu juga ada konveksi pembuatan sablon dan bordir, kerajinan anyaman dari plastik yang dibuat menjadi tas dan juga anyaman untuk pembuatan kursi dan ada juga kerajinan membuat pipa rokok.

Melihat potensi yang ada di Desa Glinggang cukup besar maka pemerintah desa mengadakan program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), langkah ini tidak semata-mata langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan menjadi tanggungjawab dari pemerintah. Pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri menjadi pihak

internal yang dikembangkan, dan mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Selama menjadi pemimpin Kepala Desa Glinggang dalam beberapa tahun terakhir memiliki prestasi-prestasi kepemimpinan yang baik. Seperti berkembnagna pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Glinggang dan meningkatnya perekonomian masyarakat dengan program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari pemerintah desa.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan keberadaan pemimpin dalam mengelola desa yang tumbuh dan berkembang. Khususnya kepemimpinan yang diterapkan untuk membawa desa tersebut mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “**POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH(UMKM) DI DESA GLINGGANG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan produksiUsaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di Desa Glinggang?
2. Bagaimana peningkatan produksiUsaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di Desa Glinggang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengambil judul diatas dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan bagaimana pola kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui peningkatan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dapat dijadikan sebagai pengetahuan umum yang digunakan pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

- Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh secara teoritis dibangku kuliah khususnya ilmu pemerintahan.
- Untuk mendapatkan data informasi guna penelitian skripsi sebagai syarat mencapai derajat kesarjanaan dibidang ilmu pemerintahan.
- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah referensi dibidang ilmu pemerintahan.

b. Bagi pemerintah

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap masalah-masalah dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa sebagai bahan koreksi dan upaya untuk meningkatkan produktivitas desa.

c. Bagi masyarakat

Menambah pengetahuan tentang UMKM dan dapat mengetahui cara – cara untuk mengembangkan UMKM.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pencapaian tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti memerlukan penegasan istilah dari setiap point-point penting dari judul penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pola Kepemimpinan

Pola kepemimpinan adalah cara yang digunakan seorang pemimpin dalam membawa dirinya sebagai pemimpin, cara pemimpin dalam menggunakan kekuasaanya misalnya pola kepemimpinan otoriter, demokratis, bebas.

2. Kepala Desa

Ialah seseorang yang memimpin kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa.

3. Meningkatkan Produksi.

Yaitu suatu cara atau strategi yang dilakukan untuk menaikkan atau mempertinggi suatu produksi.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Yaitu suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. (Tambunan, 2012)

F. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini adanya kerangka dasar teori sangat diperlukan sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

1. Pola Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Proses pelaksanaan tugas dan kewajiban pemimpin disebut dengan kepemimpinan.

Kartono dalam bukunya mengatakan bahwa “didalam kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya, dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin”. (Kartono, 2016)

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan seni dan keterampilan seseorang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditentukan (Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, Gordon J. Curphy, 2012).

Pola kepemimpinan adalah cara yang digunakan seorang pemimpin dalam membawa dirinya sebagai pemimpin, cara pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya misalnya pola kepemimpinan otoriter, demokratis, bebas.

Dalam setiap organisasi pola kepemimpinan selalu berbeda-beda. Pola kepemimpinan organisasi bisnis berbeda dengan pola kepemimpinan partai politik, berbeda pula dengan pola kepemimpinan organisasi sosial. Demikian pula dengan pola kepemimpinan pemerintahan setiap negara pasti juga mempunyai perbedaan satu sama lain dengan ciri-ciri keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pola

kepemimpinan suatu pemerintahan itu ditentukan oleh beberapa determinan, yaitu :

- 1) Filsafat negara sebagai pandangan hidup dan pandangan dunia.
- 2) Faktor Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional yang berkembang pada negara yang bersangkutan.
- 3) Kepribadian pimpinan-pimpinannya dengan segala sifat, kebiasaan, tempramen dan watak, yang menentukan corak organisasi yang akan digunakan, pembantu-pembantu yang mengelilingi dirinya, sarana yang dipakai, ideologi yang dianut dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. (Kartono, 2016)

Menurut Bimo Walgito (2007 : 102) sebuah kepemimpinan terdiri atas beberapa variabel, setidaknya dalam kepemimpinan terdapat enam variabel diantaranya adalah seorang pemimpin (posisi sekaligus subyek), kelompok yang dipimpin (obyek), tujuan atau sasaran, ada aktivitasnya (peranan), interaksi (hubungan), dan otoritas (power).

Jiwa kepemimpinan yang ada pada seorang pemimpin dibentuk oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan anugrah Tuhan yang dibawa sejak lahir seperti bakat kepemimpinan (telent), daya tarik (charisma), kewibawaan (power) dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh dari luar individu yang bersangkutan, seperti pendidikan, situasi dan kondisi lingkungan, pengalaman dan sebagainya. (Octavian Hendra Priyatno dan Anjar Mukti Wibowo)

b. Fungsi dan Tipe Kepemimpinan.

Fungsi kepemimpinan adalah gejala sosial yang harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok/ organisasi. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/ organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa pemimpin berada di dalam dan bukan diluar situasi itu.

Fungsi-fungsi pokok dalam kepemimpinan, yaitu :

1) Fungsi instruksi.

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan bagaimana pemerintahan itu dikerjakan, agar semua keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2) Fungsi konsultasi.

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Tahap pertama menetapkan keputusan, pemimpin memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap kedua konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan.

3) Fungsi partisipasi.

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin melakukan secara terkendali dan terarah yang berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin tetap dalam fungsi sebagai pemimpin bukan sebagai pelaksana.

4) Fungsi delegasi.

Fungsi ini dilaksanakan dengan melimpahkan wewenang membuat/ menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin.

5) Fungsi pengendalian.

Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. (Prof. Dr. Veithzal Rivai, 2003)

Dalam menjalankan kepemimpinan terdapat tiga tipe pokok kepemimpinan antara lain kepemimpinan otoriter, kepemimpinan kendali bebas, dan kepemimpinan demokratis. Masing-masing tipe

kepemimpinan memiliki relevansi dengan kepemimpinan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1) Kepemimpinan Otoriter

- a. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak.
- b. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi dalam kelompok tersebut.

2) Kepemimpinan Demokratis

- a. Secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau anggota kelompok untuk ikut serta dalam merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok, serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk.
- c. Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikut.
- d. Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan kelompok.

3) Kepemimpinan Bebas

- a. Pemimpin menjalankan perannya secara pasif.
- b. Penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya diserahkan pada kelompok.
- c. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok.
- d. Pemimpin berada ditengah-tengah kelompok, namun dia hanya berperan sebagai penonton (Soejarno Soekanto, 2012 : 257)

2. Kepala Desa

Menurut Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Kepala Desa adalah penduduk desa yang merupakan warga negara asli Indonesia yang

dipilih langsung oleh penduduk desa dengan memperoleh suara terbanyak dari calon yang telah memenuhi syarat.

Pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Menetapkan peraturan Desa.
- c. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- d. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- g. Membina kehidupan masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desanya didalam pengadilan dan mampu menunjukkan kuasa hukumnya.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengingat tugas kepala desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan syarat tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah mempunyai kelebihan-kelebihan yaitu : pertama, kelebihan dalam menggunakan pikiran dan rasio, dalam arti memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, dan lembaga (desa) yang dipimpinnya, dan memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien, dan profesional sehingga tercapai hasil yang maksimal. Kedua, kelebihan dalam rohani, artinya memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Ketiga, kelebihan secara fisik, artinya dapat memberikan contoh konkret dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Menurut Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah wewenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam UU No. 20 Tahun 2008 pada Bab I Pasal 1, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

- a. Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan bukan merupakan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat)

2. Bentuk perusahaan UMKM

Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Ridwan Khairandi dalam (ND, 2016) ada berbagai bentuk perusahaan di Indonesia yaitu :

- 1) Perusahaan Perseorangan
- 2) Perusahaan Firma
- 3) Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
- 4) Perseroan Terbatas
- 5) Koperasi
- 6) Perusahaan Milik Negara yang terdiri dari perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum)

Bentuk perusahaan yang dapat digunakan oleh UMKM dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan bidang gerak, serta budaya yang ada di dalamnya. Misalnya, apabila bisnis relatif kecil dan dapat dijalankan sendiri maka perusahaan perseorangan cukup efektif. Dari banyaknya bentuk perusahaan UMKM juga terdapat perusahaan UMKM yang tidak mempunyai formalitas

dan memenuhi aspek legalitas perusahaan. Mereka sering disebut dengan pengusaha sektor informal. Mereka ini seperti pedagang kaki lima, penjual asongan, tukang bakso, pengusaha warung tegal, industri rumah tangga dan lain sebagainya.(ND, 2016)

3. Faktor-faktor dalam pengembangan UMKM.

Dalam mendukung untuk pengembangan UMKM pemerintah akan melakukan usaha dengan Penumbuhan Iklim Usaha seperti yang telah diatur dalam Bab V pasal 7 ayat 1, bahwa *pemrintah dan pemerintah daerah akan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek (a) pendanaan; (b) sarana dan prasarana; (c) informasi usaha; (d) kemitraan; (e) perizinan usaha; (f) kesempatan berusaha; (g) promosi dagang; dan (h) dukungan kelembagaan.*

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam pengembangan UMKM yaitu :

a. Faktor Pendanaan.

Pemerintah memberikan dukungan dengan memperluas sumber pendanaan dengan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank. Selain itu juga memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif serta jaminan pinjaman yang disediakan pemerintah.

b. Faktor Sarana Dan Prasarana.

Persoalan sarana dan prasarana seperti tempat usaha, tarif prasarana akan diberikan keringanan dan kemudahan serta perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sangat perlu karena untuk memberikan kepastian tempat usaha, yang selama ini sering digusur karena menempati wilayah ilegal. Dan juga kepastian mengenai biaya retribusi yang sering

kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

c. Informasi Usaha.

Di zaman globalisasi ekonomi, informasi menjadi sebuah kekuatan yang powerful. Karena apa yang diperlukan dan dibutuhkan manusia sebagai *business opportunity* harus dengan cepat diketahui dan dimanifestasikan dalam bentuk transaksi bisnis. Hal ini yang membuat pemerintah menyediakan berbagai fasilitas bank data dan jaringan informasi bisnis untuk mendukung UMKM.

d. Kemitraan.

Berbagai persoalan dalam dunia bisnis seperti kebutuhan pembiayaan dan jaringan kerja dapat diatasi dengan berbagai model kemitraan.

e. Perizinan Usaha.

Salah satu hambatan untuk kemajuan UMKM adalah faktor legalitas yang juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah mengupayakan penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadusatu pintu dan berupaya memberikan pembebasan biaya perizinan bagi UMKM

f. Kesempatan Berusaha.

Pemerintah berupaya untuk penetapan alokasi wilayah untuk tempat usaha seperti pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lain-lainnya.

g. Promosi Dagang.

Sebagai salah satu aspek terpenting dalam pemasaran produk promosi kandang kala juga menjadi kendala bagi UMKM dikarenakan keterbatasan akses pasar dan dana. Oleh karena itu

pemerintah akan meningkatkan promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri.

h. Dukungan Kelembagaan.

Dalam hal ini pemerintah melakukan dukungan dengan memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Semua ini tentunya tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri, oleh karena itu dunia usaha secara umum dan masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM.(ND, 2016)

4. Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 UU No. 20 tentang UMKM, pengembangan dalam sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

- a) Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan.
- b) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial
- c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan menciptakan wirausaha baru.(Drs. Leonardus Saiman, 2009)

Berdasarkan dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia adalah subyek terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sisi permintaan peningkatan pendapatan masyarakat dapat

memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak adanya UMKM adalah sebagai berikut :

a. Dampak positif

Dengan keberadaan UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, maka permintaan terhadap produk – produk UMKM akan meningkat. Peningkatan permintaan ini akan membuka kesempatan kerja dan peluang untuk membuka atau menambah usaha kecil baru. Pengaruh positif ini juga dirasakan oleh UMKM yang bisa memenuhi perubahan selera kebutuhan kearah mengkonsumsi produk yang lebih bagus sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat.

b. Dampak negatif

Dampak negatifnya kenyataan menunjukkan bahwa UMKM adalah industri yang hanya mampu membuat produk yang bersifat inferior. Sementara masyarakat dengan pendapatan tinggi lebih menyukai produk yang lebih *sophisticated* yang biasa dihasilkan oleh usaha menengah/besar. Dengan demikian jika UMKM tidak dapat membuat produk yang lebih *sophisticated* maka akan kalah bersaing dengan usaha menengah/besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan masih menggunakan Teori Klasik.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat di ukur, sehingga nanti dalam pembahasan dapat mengarah pada pokok permasalahan.(Zulganef, 2013)

1. Pola Kepemimpinan Kepala Desa.

Pola kepemimpinan adalah cara yang digunakan seorang pemimpin dalam membawa dirinya sebagai pemimpin, cara pemimpin dalam

menggunakan kekuasaannya misalnya pola kepemimpinan otoriter, demokratis, bebas.

Kepala Desa adalah seseorang yang memimpin kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa.

Pola kepemimpinan Kepala Desa adalah suatu cara yang digunakan kepala desa dalam membawa dirinya sebagai pemimpin, cara berlagak dalam menggunakan kekuasaan.

Pola kepemimpinan yang di jalankan dalam pemerintahan Desa Glinggang yaitu Pola Kepemimpinan Demokratis. Dimana para pemimpin yang ada di desa tersebut perlu adanya musyawarah – musyawarah pada setiap kegiatan apapun yang dilakukan di pemerintahan dan di masyarakat. Pemimpin juga memberikan saran dan petunjuk yang kreatif dan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin juga ikut peran serta dalam kegiatan yang ada di desa tersebut.

2. Meningkatkan Produksi UMKM.

Meningkatkan adalah suatu cara atau strategi menaikkan dan mempertinggi suatu produksi.

Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan/menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau badan (produsen).

UMKM adalah suatu usaha produktif yang dilakukan oleh orang perorangan yang berdiri sendiri, usaha ini bergerak dalam semua sektor ekonomi.(Tambunan, 2012)

Meningkatkan produksi UMKM adalah suatu cara atau strategi untuk menaikkan atau mempertinggi suatu produksi yang dihasilkan dari usaha produktif untuk mencapai tujuan dari produksi tersebut.

Berdasarkan dari uraian teori yang telah dikemukakan diatas jenis UMKM yang ada di Desa Glinggang ini merupakan jenis pengusaha sektor informal. Karena, belum memenuhi legalitas perusahaan dalam jenis pengusaha UMKM.

H. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian skripsi, penggunaan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian sangatlah diperlukan supaya diperoleh hasil data yang tepat, relevan dan sesuai dengan keinginan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, aktual dan faktual yang akurat terhadap fenomena yang diteliti serta untuk mengungkap fakta dan bukan merupakan pengujian hipotesa.

Metode ini dipakai karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang nampak serta untuk mengungkapkan bagaimanakah pola kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sehingga dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui peningkatan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Glinggang.

Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam metode penelitian ini diantaranya :

1. Metode penentuan lokasi

Dengan mempertimbangkan segala hal, baik itu energi, efisiensi, waktu dan sebagainya, serta disesuaikan dengan judul penelitian ini maka penulis mentukan daerah penelitian di Desa Glinggang

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa penduduk desa setempat.

2. Metode penentuan informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan keterangan tersebut harus benar adanya. Dalam hal ini pemilihan informan ditentukan dengan melihat permasalahan yang sedang diteliti agar diperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan masalah yang telah dirumuskan. Dan diharapkan agar informan yang dipilih adalah informan yang relevan, aktual, dan faktual mengenai masalah yang sedang diteliti serta diperlukan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Pelaku UMKM : 4 orang

3. Metode pengumpulan data

Teknik penulisan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

a. Interview

Interview adalah salah satu metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya secara langsung kepada narasumber. Teknik wawancara / interview digunakan untuk memperoleh keterangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian sehingga akan diperoleh data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari data-data mengenai variabel yang berupa catatan atau pengumpulan berbagai arsip instansi yang bersangkutan, agenda, dokumen-dokumen dan sebagainya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Sehingga teknik ini akan mempermudah untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penulis.

4. Metode analisis data

Agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti, maka perlu dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan penelitian. analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif non statistik yang mana menurut metode deskriptif untuk menganalisis diperlukan adanya proses tertentu, secara garis besar peneliti akan menggunakan proses sebagai berikut :

a. Proses pengumpulan data

Data-data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian dikumpulkan atau dikelompokkan menurut kelompok variabel yang ada.

b. Proses deskriptif data

Data-data yang telah diperoleh selanjutnya diuraikan dalam bentuk penyajian data berdasarkan jumlah variabel penelitian

c. Proses analisis

Proses ini disebut juga proses analisis data yang dilakukan dengan didukung teori-teori dan data yang telah disajikan menurut kadar kemampuan intelektual penulis.

d. Proses penarikan kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, maka hasil dari analisis data tersebut akan diketahui bagaimana sebenarnya kondisi yang ada dilokasi penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Langkah akhir dari analisis data yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.